**Analisis Surplus Padi dan Kaitannya Dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani**

(Suatu Studi Tentang Marketable Surplus dan Marketed Surplus Komoditas Padi Serta Tingkat Ketahanan Pangan Pada Rumah Tangga Petani Padi

di Kabupaten Subang)

Analysis of Surplus of Rice and Its Relation With Farmer Household Food Security

(A Study on Marketable Surplus and Marketed Surplus of Rice Commodity As Well As Food Security In Household Level Rice Farmers

In Subang Regency)

Kundang Harisman (kundangh@yahoo.com)

Abstract

 Food security has become a central issue in the framework of agricultural development and national development. The establishment of a special institution that handles food security issues namely the Food Security Affairs Agency in 2000 and then in 2001 was changed to the Agency for Mass Guidance on Food Security showed the importance of handling the problem of food security. This institution is expected to strengthen the food security system for domestic interests, given the changing international and domestic strategic environment. Uncertainty and instability of national food production, can not automatically rely on the availability of food in the world market. Existence of food availability at regional level (national and regional) does not guarantee food security at the individual or household level. The results showed the average of household consumption expenditure of rice farmers for food that is Rp. 6,417,519 shows greater than non-food consumption expenditure of Rp. 5.290.062,5. In the allocation of consumption expenditure for food, the proportion of rice consumption is greater than other types of food. The annual per capita rice consumption level in the average 130 kg of rice farming households exceeds the standard of rice consumed according to the Ministry of Agriculture of 109.5 kg per capita per year but tends to be lower than the average consumption rate of Indonesians according to FAO data Amounting to 133 Kg per capita per year

Key words: consumption, environment, food, national.

# 1. Pendahuluan

Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Dibentuknya lembaga khusus yang menangani masalah ketahanan pangan yaitu Badan Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2000 kemudian pada tahun 2001 dirubah menjadi Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan menunjukkan pentingnya penanganan masalah ketahanan pangan. Lembaga ini diharapkan dapat memantapkan sistem ketahanan pangan untuk kepentingan dalam negeri, mengingat adanya perubahan lingkungan strategis internasional dan domestik. Ketidakpastian dan ketidakstabilan produksi pangan nasional, tidak otomatis dapat mengandalkan pada ketersediaan pangan di pasar dunia (Handewi dan Mewa , 2002).

Pengalaman sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial politik nasional, sehingga ketahanan pangan menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Ketahanan pangan menyangkut aspek-aspek : penyediaan jumlah bahan-bahan pangan yang cukup, pemenuhan tuntutan kualitas dan keanekaragaman bahan pangan, pendistribusian bahan pangan, serta keterjangkauan pangan (Subandi, 2011; Saragih, 2001). Pengembangan tanaman pangan difokuskan untuk menuju pada ketahanan pangan yang berbeda dengan budidaya tanaman perkebunan yang juga menuju didapatnya devisa Negara dari export hasil tanaman perkebunan (Subandi, 2011a)

Menurut Tampubolon (2004), ketahanan pangan nasional akan mantap apabila kondisi ketahanan pangan masing-masing rumah tangga atau keluarga juga mantap. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan basis pemantapan ketahanan pangan suatu daerah dan pada akhirnya di tingkat nasional.

Adanya kelebihan ketersediaan pangan di tingkat wilayah (nasional maupun regional) tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat individu atau rumah tangga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya kasus-kasus kurang gizi dan rawan pangan sejak terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, faktor akses individu dalam menjangkau kebutuhan pangan yang diperlukan merupakan faktor kunci ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Akses individu terhadap pangan yang dibutuhkan sangat dipengaruhi oleh daya beli, tingkat pendapatan, harga pangan, proses distribusi pangan, kelembagaan di tingkat lokal dan faktor sosial lainnya (Handewi dan mewa, 2002).

Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga pada tahun 1996 menghasilkan rumusan ketahanan pangan rumah tangga yang didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memenuhi pangan anggota keluarga dari waktu ke waktu dan berkelanjutan baik dari produksi sendiri maupun membeli dalam jumlah, mutu dan ragamnya sesuai dengan lingkungan setempat serta sosial budaya rumah tangga agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif (Handewi dan Mewa, 2002).

Sawit dan Ariani (1997) mengemukakan bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional, dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sedangkan, penentu utama di tingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko yang terkait dengan ketersediaan pangan tersebut. Menurut FAO (1996) salah satu kunci terpenting dalam mendukung ketahanan pangan adalah tersedianya dana yang cukup (negara dan rumah tangga) untuk memperoleh pangan.

 Ketahanan pangan selalu dikaitkan dengan stabilitas harga pangan atau pangan pokok utama suatu negara. Simatupang (1999) dalam Handewi Rahman dan Mewa Ariani (2002) menyebutkan bahwa ketahanan pangan sinonim dengan stabilitas harga pangan, oleh karenanya pandangan tersebut menggunakan pendekatan stabilitas harga pangan pokok untuk kondisi ketahanan pangan.

Peraturan Pemerintah RI No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan menjelaskan bahwa sumber penyediaan pangan diwujudkan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pemerataan ketersedian pangan memerlukan pendistribusian pangan ke seluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga.

Beras merupakan pangan pokok utama di sebagian besar wilayah di Indonesia, dalam menu makanan masyarakat pada umumnya beras memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan konsumsi lauk-pauk, sayuran maupun buah-buahan ataupun pangan pokok lainnya. Berdasarkan susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional, kelompok pangan padi-padian (beras) memberikan sumbangan energi terbesar yaitu sebesar 50 % terhadap total energi untuk sebagian besar propinsi di Indonesia. Diperkirakan tingkat partisipasi konsumsi beras di Indonesia pada tahun 2001 telah melewati angka 95 % (Tampubolon, 2004).

Salah satu fokus kebijakan operasional pembangunan pertanian tanaman pangan adalah upaya peningkatan produksi padi nasional. Terjadinya peningkatan produksi padi diharapkan dapat menciptakan *marketable surplus* padi yang besar, sehingga pemenuhan suplai beras dalam negeri dapat terpenuhi. Terjadinya *marketable surplus*  padi yang besar juga akan mampu menunjang sektor industri dan perekonomian secara keseluruhan.

Pada dasarnya, tingkat *marketable surplus* dan *marketed surplus* padi akan ditentukan oleh tinggi rendahnya jumlah hasil produksi yang dikonsumsi dan yang dijual petani serta jumlah petani di suatu wilayah tertentu. Besarnya *marketable surplus* padi dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan suatu wilayah dalam hal ketahanan pangan di wilayah tertentu serta kebijakan pembangunan pertanian pada umumnya ( Mubyarto, 1967).

Surplus produksi padi yang dimiliki di tingkat petani maupun di suatu wilayah dapat dijadikan salah satu tolak ukur ketahanan pangan pokok (beras) di wilayah tersebut. Ketahanan pangan pokok yang dimaksud adalah ketersediaan pangan pokok dan atau kecukupannya di tingkat keluarga, baik secara kontinu maupun dalam kurun waktu tertentu ( Tampubolon , 2002 ).

Menurut Singarimbun dan Penny (1976), rumusan swasembada beras belum tentu berlaku bagi semua orang. Banyak penyusun kebijaksanaan atau ahli ekonomi beranggapan bahwa petani selalu mempunyai cukup makanan (beras) dan bahwa jika mereka menjualnya adalah karena mereka mempunyai surplus sesudah keperluan konsumsi mereka terpenuhi. Namun ternyata keadaan yang sebenarnya tidak selalu demikian. Jumlah hasil produksi yang dijual terkadang belum tentu mencukupi untuk kebutuhan konsumsi keluarganya.

Wortman dan Cumming (1978) dalam Penny (1990) mengungkapkan bahwa peningkatan produksi dan pendapatan sebagai *sine qua non* atau salah satu upaya pemecahan masalah yang dapat mengatasi kekurangan bahan makanan dan kemiskinan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa petani harus dibawa pada titik dimana mereka dapat menghasilkan surplus untuk dijual, karena petani-petani tradisional harus dibawa kedalam perekonomian pasar.

Hingga saat ini permintaan terhadap beras terus mengalami peningkatan yang cukup besar, sedangkan peningkatan produksi padi relatif kecil. Permintaan terhadap beras meliputi konsumsi di dalam rumah, di luar rumah antara lain di rumah makan dan hotel, industri pengolahan bahan pangan serta kebutuhan untuk cadangan rumah tangga. Selain itu, produk padi juga dipergunakan untuk benih dan campuran pakan. Menurut data dari Survey Sosial Ekonomi Nasional bahwa komposisi penggunaan beras pada tahun 2003 yaitu 79,6 % konsumsi beras di dalam rumah, 10,8 % di luar rumah dan 9,6 % industri pengolahan bahan pangan (BPS, 2004).

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai persediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus menerus berkembang dari waktu ke waktu. Informasi mengenai keseimbangan ketersediaan beras dengan konsumsi nasional tahun 2005-2008 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Keseimbangan Ketersediaan Beras Dan Permintaan Beras Untuk Konsumsi Nasional Tahun 2005–2008**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Produksi****(JutaTon)** | **Ketersediaan Beras****(Juta Ton)** | **Permintaan Beras****( Juta Ton )** |
| 2005200620072008 |  50,1050,6051,1051,61 | 30,2830,5930,8931,20 | 32,7733,0733,3733,67  |

Sumber : BPS, 2008

Tabel diatas menunjukan bahwa peningkatan produksi padi relatif kecil bila dibandingkan dengan peningkatan permintaan beras yang semakin besar setiap tahun. Kondisi tidak seimbangnya ketersediaan beras dengan permintan beras apabila diserahkan pada mekanisme pasar, maka hukum *supply* dan *demand* akan menentukan harga pada titik keseimbangannya. Dengan demikian tingkat harga yang pantas akan mendorong petani untuk meningkatkan hasil produksinya (*marketable surplus*), selain itu juga pendapatan dan kesejahteraan petani pun turut meningkat.

Menurut Pakpahan dan Sri Hastuti (1989), Pengembangan ketahanan pangan dengan pendekataan agribisnis diyakini mampu meningkatkan pendapatan petani sehingga aksesibilitas mereka terhadap pangan akan meningkat sejalan dengan ketersediaan pangan yang semakin baik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga petani maka semakin tinggi pula tingkat kecukupan pangan rumah tangga tersebut. Departemen Pertanian tahun 2008 juga mengungkapkan bahwa tingkat ketahanan pangan yang tinggi akan diikuti oleh tingkat diversifikasinya.

Kecamatan Pamanukan merupakan salah satu daerah sentra produksi padi di Kabupaten Subang. Pada tahun 2005 Kecamatan Pamanukan menjadi penghasil padi terbesar di Kabupaten Subang. Kecamatan Pamanukan memiliki luas lahan padi sawah sekitar 2.985 hektar dan memiliki jumlah padi yang dijual sebesar 5.950 ton sedangkan jumlah padi yang dikonsumsinya sebesar 424 ton. Secara keseluruhan di Kabupaten Subang memiliki nilai surplus.

Desa Pamanukan Hilir merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pamanukan. Berdasarkan analisa ketersediaan beras dan kebutuhan konsumsi beras di Desa Pamanukan Hilir, menunjukkan bahwa pada tahun 2005 daerah tersebut memiliki nilai surplus padi sebesar 158,13 ton.

Kecamatan Pamanukan menunjukkan nilai surplus sebesar 3.141,53 ton. Sedangkan, nilai surplus padi di Desa Pamanukan Hilir merupakan urutan pertama dari sejumlah desa yang ada di Kecamatan Pamanukan.

Berdasarkan fenomena di lapangan, maka akan sangat menarik untuk diteliti mengenai gambaran *Marketable Surplus* dan *Marketed Surplus* di Desa Pamanukan Hilir dilihat dari tingkat hasil produksi, proporsi padi untuk dikonsumsi dan yang dijual oleh petani, faktor-faktor yang mempengaruhi surplus padi*,* serta gambaran tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani dilihat dari pola pengeluaran konsumsinya. Subandi and Mahmoud (2014) dan Subandi (2012) menyebutkan studi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia adalah sejalan dengan tujuan diberikannya akal kepada manusia yang berpikir untuk menelaah alam lingkungannya sehingga lebih bermanfaat untuk kehidupan.

1. **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di latar belakang maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimana gambaran tingkat *marketable surplus* dan *marketed surplus* komoditas padi di Desa Pamanukan Hilir.
2. Bagaimana gambaran tingkat ketahanan pangan pada rumah tangga petani padi di Desa Pamanukan Hilir.

**3. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Adiratma (1962), yang dimaksud dengan *marketable surplus* secara makro adalah suplai hasil produksi tanaman pangan yang disediakan petani produsen untuk dijual, dimana hasil produksi yang ditujukan untuk dijual merupakan kelebihan dari kebutuhan konsumsinya (bersifat potensial). Sedangkan *marketed surplus* merupakan jumlah penjualan dari semua golongan petani, baik petani yang surplus ataupun petani yang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pun belum mencukupi (bersifat aktual).

Besarnya *marketable surplus* diperoleh dengan menghitung selisih dari jumlah produksi padi setelah dikurangi jumlah padi yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani kemudian dikalikan dengan jumlah petani di daerah tertentu. Sedangkan *marketed surplus* dihitung dengan cara mengalikan antara rata-rata jumlah penjualan padi dengan jumlah petani yang ada di daerah tertentu (Direktorat Bina Sarana Usaha Tanaman Pangan, 1978 dalam Edi Kusniadi dan S.Ratnaningtyas, 2000).

Menurut Mubyarto (1967), *Marketable Surplus* akan berhubungan erat dengan harga padi. Efek kenaikan harga akan bermacam – macam, sebab petani sewaktu – waktu dapat bertindak sebagai produsen ataupun sebagai konsumen.

Bagi petani produsen kenaikan harga akan mendorong kenaikan produksi. Sedangkan bagi petani berlahan sempit sekaligus berperan sebagai konsumen, maka kenaikan harga akan dapat mengurangi konsumsi padi (melalui *subtitution effect*) atau dapat pula menaikan konsumsi beras (melalui *income* *effect*). Untuk petani yang relatif tinggi taraf hidupnya, maka kenaikan harga beras dapat menaikkan penjualan hasil produksinya, sedang bagi petani miskin akan menurunkan *marketable surplus*nya.

Soekartawi (2002) mengemukakan bahwa salah satu perangsang petani untuk meningkatkan produksi usahataninya yaitu melalui kebijakan harga. Ketika jumlah permintaan beras lebih banyak dari jumlah produksi maka harga padi atau beras akan cenderung naik apabila diserahkan pada mekanisme pasar. Hal tersebut akan merangsang petani untuk mengusahakan padi yang benar – benar ditujukan untuk dijual *(komersial*) disamping rumah tangga petani tersebut mengatur kembali pola konsumsi keluarganya. Dengan demikian, *marketable surplus* yang ada di petani cenderung meningkat.

Pengaruh harga hasil usahatani dan harga *input* terhadap kuatnya daya dorong bagi petani untuk menaikan produksinya adalah :

1. Petani hanya akan menaikan produksi komoditi tertentu yang akan dijualnya, apabila harga komoditi tersebut cukup menarik baginya.
2. Petani akan memberikan respon terhadap perubahan harga relatif dari tanam – tanaman yang sedang diusahakan dengan jalan menaikan produksi tanaman yang mempunyai harga yang lebih tinggi di pasar, kecuali apabila hal itu akan membahayakan persediaan makanan keluarganya sendiri.
3. Petani akan memberikan respon terhadap kenaikan harga hasil tanaman tertentu dengan menggunakan teknologi yang lebih maju untuk meningkatkan produksi tanaman tersebut jika barang – barang *input* yang diperlukan tersedia secara lokal, mengetahui bagaimana menggunakan *input* tersebut secara efektif, dan jika harga *input* tersebut tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diharapkan dari hasilnya.

Piere Spits (1980) dalam D.H Penny (1990) menyatakan bahwa komoditas pangan pokok (padi) memiliki dua sifat, yakni sebagai kebutuhan dasar (retensi) dan sebagai barang dagang (ekstraksi). Didalam rumah tangga petani produsen, dimana penyediaan untuk diri sendiri masih memegang peran penting, terdapat usaha-usaha petani untuk dapat melepaskan hasil produksinya ke pasar disamping itu juga terdapat usaha-usaha untuk tetap mempertahankannya.

Menurut Sajogyo dalam Singarimbun ( 1976 ) mengungkapkan suatu kondisi dimana penawaran akan sama dengan permintaan komoditas beras pada tingkat harga yang pantas. Misalnya, jika produksi dalam negeri perkapita mencapai suatu tingkat 105 – 110 Kg per tahun,sedangkan tingkat konsumsi yang harus tersedia bagi konsumen adalah 125 Kg beras. Maka perlu adanya perubahan dalam cara pandang untuk mengatasinya, yaitu :

* 1. Bahwa kenaikan *marketable surplus* (beras lebih yang diperdagangkan) tidak diikuti oleh perubahan besar dalam jumlah orang yang mampu memakan nasi sepanjang tahun.
	2. Perlu disadari bahwa jalan yang paling ekonomis untuk meningkatkan produksi maupun konsumsi beras, yakni mengembangkan volume pasar untuk beras adalah melaksanakan program pertanian yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan petani miskin.

Selanjutnya Mubyarto (1967) mengungkapkan bahwa jumlah hasil produksi tanaman padi yang dijual atau dipertukarkan oleh petani kecil dan buruh tani pada umumnya lebih besar dari jumlah konsumsi yang dibutuhkannya.

Setiap rumah tangga mempunyai tingkat kecukupan konsumsi yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi adalah pendapatan. Bagi rumah tangga petani kecil dengan tingkat pendapatan yang terbatas, tingkat kecukupan konsumsi pada umumnya akan terbatas pada kecukupan konsumsi bahan makanan, terutama beras. Sedangkan bagi petani berlahan luas dan berpendapatan tinggi, selain pengeluaran konsumsi makanan juga konsumsi non makanan ( Sugiyarto, 1994 ).

Menurut Mubyarto (1967), faktor – faktor yang mempengaruhi *marketable surplus* adalah :

1. Hasil produksi

 Jika hasil produksi yang diterima petani meningkat, maka petani memperoleh keuntungan dari kelebihan hasil produksinya. Semakin banyak keuntungan yang diterima oleh petani maka akan menciptakan *Marketable Surplus* yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian Edi Kusniadi dan S.Ratnaningtyas (2000), menunjukkan bahwa tingkat hasil produksi padi secara statistik berpengaruh nyata positif terhadap tingkat *marketable surplus*, artinya semakin tinggi tingkat hasil produksi akan mengakibatkan semakin tingginya *marketable surplus* padi atau sebaliknya (Cateris Varibus).

2. Harga

Salah satu perangsang petani untuk meningkatkan produksi usaha taninya yaitu melalui kebijakan harga. Apabila harga beras padi cenderung naik maka akan merangsang petani untuk mengusahakan padi yang benar-benar ditujukan untuk dijual. Dengan demikian, *Marketable Surplus* yang ada di petani cenderung meningkat.

1. Biaya variabel usahatani

Biaya variabel usahatani berkorelasi positif dengan luas usahatani. Semakin meningkat biaya usahatani akan cukup berarti terhadap peningkatan *marketable surplus.* Biaya variabel usahatani meliputi alokasi penggunaan sarana produksi (pupuk, benih, pestisida) dan tenagakerja, dimana tingkat penerapannya akan mempengaruhi tingkat hasil produksi.

1. Tingkat konsumsi beras

Dalam rumah tangga petani biasanya konsumsi makanan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan besarnya jumlah anggota keluarga. Semakin bertambah jumlah padi atau beras yang dikonsumsi maka akan mempengaruhi berkurangnya *marketable surplus.* Hal tersebut dikarenakan hasil produksi usahatani yang ditujukan untuk dijual akan berkurang akibat untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok keluarganya.

1. Kegiatan usaha diluar usahatani

Bagi petani yang memiliki cabang usaha diluar usahatani akan cenderung meningkatkan *marketable surplus*nya, hal ini dikarenakan dengan adanya tambahan pendapatan dari usaha lain. Pada kelompok petani berpendapatan rendah kebutuhan konsumsi pangan sumber karbohidrat lebih besar, sedangkan pada kelompok berpendapatan cukup atau tinggi akan cenderung meningkatkan konsumsi bahan pangan lain yang memiliki kualitas gizi yang lengkap.

1. Ketersediaan uang tunai

Konsumsi beras pada rumah tangga petani pada umumnya berasal dari produksi sendiri sehingga hal tersebut menyebabkan tidak adanya biaya pengeluaran. Namun, keadaan tersebut akan berbeda dengan konsumsi makanan non beras, dimana rumah tangga petani perlu mengeluarkan uang atau biaya pengorbanan ( barang ekonomis ). Petani memperoleh sumber biaya untuk membeli bahan pangan non beras biasanya berasal dari penjualan hasil produksinya. Oleh karenanya, keadaan itu memberikan gambaran tentang tingkat ketersediaan uang tunai di rumah tangga petani. Apabila petani memiliki ketersediaan uang tunai persatuan waktu tertentu maka hal itu berarti *marketable surplus*nya meningkat.

Salah satu indikator ketahanan pangan rumah tangga yang sangat penting adalah besarnya perbandingan pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga, yang pada umumnya disebut pangsa pengeluaran pangan. Pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan negatif dengan pengeluaran rumah tangga, selanjutnya ketahanan pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan (Departemen Pertanian, 1997 dalam Ratnaningtyas, 2004 ).

Hasil penelitian Kundang Harisman dan Dian Anggraeni (2004) yang dilakukan pada kelompok rumah tangga petani di Desa Cilembu menunjukkan persentase pengeluaran untuk padi-padian (beras) sebesar 24 - 29 % dari total pengeluaran pangan dan merupakan persentase terbesar dari jenis bahan pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa padi-padian dalam hal ini beras masih menempati porsi terbesar dalam pola pengeluaran konsumsi rumah tangga petani.

Hasil penelitian Surjaman Tardan yang dilakukan di Karawang tahun 1969 menyatakan bahwa pada rumah tangga petani dalam upaya pemenuhan konsumsi bahan pangan pokok (beras) lebih berorientasi pada persediaan padi yang dimilikinya (tidak ada biaya pengeluaran konsumsi bahan pangan pokok). Akibatnya pendapatan yang diperolehnya dipergunakan untuk memenuhi konsumsi pangan non beras atau kebutuhan lainnya yang termasuk non pangan.

Hukum Engel menyatakan bahwa sampai batas tertentu peningkatan pendapatan masyarakat akan dipergunakan untuk memenuhi konsumsi bahan makanan, tetapi setelah batas tersebut dilewati maka masyarakat akan cenderung meningkatkan konsumsi bukan makanan. Pendapatan rumah tangga berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan ataupun penganekaragaman pangannya, sebab peningkatan konsumsi pangan akan meningkat pada tingkat tertentu seiring dengan meningkatnya pendapatan (Pakpahan dan Sri Hastuti, 1989).

 Pendapatan rumah tangga didapat dari dua sumber pendapatan yaitu pendapatan dari sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sumber dari sektor pertanian diperinci lagi menjadi pendapatan dari usahatani, pertanian lain dan buruh tani. Usahatani yang dimaksud adalah usahatani lahan yang dikerjakan secara intensif (Departemen Pertanian, 2004).

Pendapatan dari non pertanian adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha di luar kegiatan usahatani. Pendapatan non pertanian dapat dibedakan menjadi pendapatan yang berasal dari perdagangan, industri rumah tangga, buruh non pertanian, pegawai jasa, dan lain-lain (Departemen Pertanian, 2004)..

Hasil pendapatan dari berbagai kegiatan atau sumber tersebut baik pendapatan pertanian dan pendapatan non pertanian merupakan total pendapatan rumh tangga. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga petani di luar kegiatan pertanian bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah karena luas lahan sempit dan tingkat produksi rendah merupakan upaya untuk memperoleh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (Departemen Pertanian, 2004).

Menurut Sugiyarto (1994), dalam menentukan tingkat pendapatan rumah tangga petani dapat dilakukan melalui pendekatan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut. Pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran rata-rata perkapita sebulan yaitu berupa biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi pangan dan non pangan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk usaha atau yang diberikan pihak lain.

Barang konsumsi yang termasuk makanan atau pangan meliputi padi (beras), umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak goreng, bumbu-bumbuan dan tembakau (rokok). Sedangkan barang konsumsi yang bukan makanan non pangan meliputi perumahan, bahan bakar, penerangan, air, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, barang tahan lama, aneka barang dan jasa, pajak, pendidikan,biaya kesehatan, dan keperluan untuk undangan, sumbangan atau lainnya (BPS, 2004).

Rumah tangga petani lapisan atas (luas lahan kepemilikan lebih luas dari 1 hektar) sempat memperoleh surplus yang menjadi modal usaha yang berarti bagi kelanjutan usahatani maupun usaha diluar pertanian. Pada golongan petani ini terjadi akumulasi modal. Sebaliknya, rumah tangga petani lapisan bawah (lahan sempit atau tanpa lahan milik) tidak mempunyai surplus, dan usaha diluar pertanian umumnya bermodal kecil dengan hasil pendapatan yang rendah, dalam pola nafkah ganda pada umumnya para petani ini bertahan ( DH. Penny, 1990 ).

Maxwell et al. (2000) dalam Handewi Rahman dan Mewa Ariani (2002) menggunakan indikator pangsa pengeluaran pangan untuk mengukur derajat ketahanan pangan rumah tangga. Rumah tangga dikategorikan tahan pangan apabila memiliki pangsa pengeluaran pangan rendah (kurang dari 60 % dari pengeluaran rumah tangga) dan rumah tangga rentan pangan didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki pangsa pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 % dari pengeluaran rumah tangga). Pangsa pengeluaran pangan tergantung dari faktor harga, jumlah komoditas yang dikonsumsi, dan pendapatan rumah tangga yang tersedia.

Pengukuran pangsa pengeluaran pangan relatif mudah. Cukup dengan mendata besaran pengeluaran rumah tangga untuk pangan persatuan waktu dan mendata pendapatan total rumah tangga tersebut. Setiap rumah tangga cenderung masih dapat mengingat besarnya satuan uang tunai yang dikeluarkan, walaupun setiap rumah tangga tersebut tidak selalu mempunyai catatan, namun data yang diperoleh cukup akurat ( Ratnaningtyas, 2004 ).

Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan makanan pokok persatuan waktu biasanya relatif sama. Sehingga pola pengeluaran konsumsi rumah tangga yang bersifat rutin dapat dijadikan ukuran dalam menentukan kebutuhan fisik minimum rumah tangga ( Sugiyarto, 1994 ).

Hubungan antara pangsa pasar pengeluaran pangan dengan total pengeluaran rumah tangga dikenal dengan Hukum Working (Working, 1993 dalam Dep. Pertanian, 1997 dalam Yuniasih, 2000). Hokum tersebut menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan memiliki hubungan yang negatif dengan pengeluaran rumah tangga yaitu semakin besar pangsa pengeluaran rumah tangga semakin rendah ketahanan pangan rumah tangga. Dengan mengetahui pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga kita akan mengetahui tingkat ketahanan pangan relatif daripada rumah tangga tersebut. Dengan demikian kemampuan sebuah rumag tangga memiliki akses terhadap pangan tercermin dalam pangsa pengeluaran pangan rumah tangga untuk membeli makanan apabila pengeluaran rumah tangga T, pengeluaran untuk pangan Tf maka pangsa pengeluaran pangan Sf adalah:



Mengingat Sf  = 

Dimana Pi adalah harga komoditas qi, pangsa pengeluaran pangan tergantung dari factor harga, jumlah komoditas yang dikonsumsi, dan pendapatan rumah tangga yang tersedia.

**4. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Gambaran tingkat *marketable surplus* dan *marketed surplus* komoditas padi di Desa Pamanukan Hilir.
2. Gambaran tingkat ketahanan pangan pada rumah tangga petani padi sawah di Desa Pamanukan Hilir.

# Metode Penelitian

**5.1 Teknik Penelitian**

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dalam hal ini survei sampel, artinya data dikumpulkan dari sampel atau sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif developmental, karena tujuannya untuk menyajikan gambaran secara struktural, faktual, mengenai fakta – fakta serta hubungan antara variabel yang diteliti, dan selanjutnya dilakukan analisis melalui analisis deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani padi sawah. Objek penelitiannya yaitu *marketable surplus* dan *marketed surplus*, dan tingkat ketahanan pangan di rumah tangga petani padi.

**5.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

 Memperhatikan pendekatan masalah yang telah dikemukakan, untuk lebih mempermudah penelitian ini diungkapkan definisi – definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. *Marketable Surplus* adalah jumlah hasil produksi pangan yang dijual petani – petani surplus, dimana jumlah tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhannya, satuannya adalah Ton Gabah Kering Pungut.

Indikatornya yaitu :

- Jumlah total hasil produksi.

- Jumlah hasil produksi yang dikonsumsi keluarga petani.

 - Banyaknya rumah tangga petani.

20

1. *Marketed surplus* adalah jumlah hasil produksi tanaman pangan yang dijual dan dipertukarkan oleh petani, baik oleh petani yang berlebih ataupun petani yang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pun belum mencukupi, satuan ukurnya Ton Gabah Kering Pungut. Indikatornya yaitu :

- Rata-rata jumlah hasil produksi padi yang dijual oleh petani di suatu desa.

- Jumlah total rumah tangga petani padi di suatu desa.

1. Hasil produksi yaitu jumlah padi yang diperoleh petani per satuan luas lahan per musim tanam dalam satu tahun, satuan ukurnya Kg Gabah Kering Pungut per tahun.
2. Konsumsi padi yaitu jumlah kebutuhan konsumsi padi minimum (setara dengan beras) yang dikonsumsi rumah tangga petani selama satu tahun, satuan ukurnya Kg Gabah Kering Pungut per tahun.
3. Penjualan padi yaitu jumlah padi yang dijual oleh petani per musim tanam dalam satu tahun, satuan ukurnya adalah Kg Gabah Kering Pungut per tahun.
4. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi tersedianya pangan dengan harga terjangkau dan terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan yang tercermin dari tersediasnya pangan atau olahannya hingga di tingkat petani.
5. Pangsa pengeluaran pangan adalah salah satu indikator untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan, yaitu dengan membandingkan pengeluaran pangan dengan pengeluaran total rumah tangga petani dengan satuan pengukuran persentase. Indikator yang digunakan :

- Tingkat konsumsi rumah tangga untuk bahan pangan (Rp/tahun), yaitu pengeluaran untuk kebutuhan pangan meliputi beras, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, minyak goreng dan tembakau (rokok) selama satu tahun.

- Pengeluaran total rumah tangga petani (Rp/tahun), adalah seluruh

 pengeluaran rumah tangga dari mulai pangan, sandang, papan, dan pendidikan, aneka barang serta jasa, barang-barang tahan lama, biaya kesehatan, pajak dan pengeluaran lain-lain (terkecuali pengeluaran untuk biaya usaha).

**5.3 Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini jenis data, sumber dan cara pengumpulannya dapat dilihat pada tabel 4.

###### Tabel 4. Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Data** | **Sumber Data** | **Teknik Pengumpulan** |
| 1. | Data Primer* 1. Identitas responden
	+ Usia
	+ Jumlah tanggungan
	+ Pendidikan
	+ Pengalaman usaha tani
	+ Mata Pencaharian lain
	1. Usahatani
	+ Luas lahan garapan
	+ Jumlah dan jenis *input* produksi
	+ Hasil produksi
	+ Jumlah hasil produksi yang dijual dan dikonsumsi.

c. Pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan rumah tangga petani padi | PetaniPetaniPetani | WawancaraWawancara, KuisionerWawancara, Kuisioner |
| 2. | Data Sekunder* + Potensi desa
	+ Data curah hujan
	+ Data Statistik
 | Monografi desaDinas PSDA&PBPS | Studi pustakaStudi pustakaStudi pustaka |

* 1. **Teknik Penentuan Responden**

Teknik penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode sampel acak sederhana ( *Simple Random Sampling* ) dalam hal ini petani penggarap padi sawah yang berada di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Populasi petani penggarap padi sawah di Desa Pamanukan Hilir sebanyak 1242 orang. Selanjutnya penentuan responden petani penggarap dilakukan melalui pendekatan rumus yang dikemukakan oleh Toto Warsa dan Cucu S. A ( 1979 ), yaitu :

 n = N. Z2. S2

 N. d2 + Z2. S2

Dimana : n = Ukuran sample unit penelitian

 N = Ukuran populasi petani ( 1242 )

 Z = Nilai Z pada derajat kepercayan 90 % (1,645)

 S = Standar deviasi luas lahan yang dikuasai petani ( berdasarkan survei

 pendahuluan ) = 0,35

 d = Nilai toleransi tingkat kekeliruan (α=10%)= 0,10

 n = 1242 . ( 1,645 )2 . ( 0,35)2

 1242 . ( 0,10 )2 + ( 1,645 )2. ( 0,35 )2

 = 32 orang

* 1. **Teknik Analisis**
1. Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama dengan rumus :
	1. Besarnya *Marketable Surplus*

MS = ( P – K ) x JR

 Dimana, MS = *Marketable surplus* Desa Pamanukan Hilir

 (P-K) = Rata – rata selisih antara jumlah produksi dengan jumlah konsumsi keluarga petani (angka ini didekati dari rata – rata sampel).

 JR = Jumlah rumah tangga petani padi yang ada di Situraja (populasi).

* 1. Besarnya *Marketed Surplus*

Mds = PR x JR

Dimana, Mds = *Marketed surplus* untuk Desa Pamanukan Hilir

PR = Rata–rata penjualan padi petani (angka ini didekati dari rata – rata sampel).

 JR = Jumlah rumah tangga petani padi di Desa Pamanukan Hilir

1. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan pada rumah tangga petani padi digunakan rumus pangsa pengeluaran pangan.

Kategori :

 pangsa pengeluaran pangan < 60 % : tahan pangan

 pangsa pengeluaran pangan > 60 % : rentan pangan

 Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Sr = ( Tr ) x 100 %

 T

Dimana, Sr = Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani padi ( % )

 Tr = Rata-rata pengeluaran rumah tangga petani untuk

 bahan pangan ( Rp )

 T = Pengeluaran total rumah tangga petani pangan dan

 non pangan ( Rp )

9. Hasil dan Pembahasan

29

* 1. **Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani yang berjumlah 32 orang. Pembahasan karakteristik responden meliputi keadaan umur, tingkat pendidikan, pengalaman usahatani, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan garapan, dan kegiatan usaha di luar usahatani.

* + 1. **Keadaan Umur Responden**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, umur responden berkisar antara 40 - 66 tahun. Apabila dihubungkan dengan standar umur produktif yang dikemukakan oleh Sisdjiatmo Kusumowidho (1981**)**  yaitu antara 15 - 64 tahun maka sebagian besar responden termasuk ke dalam umur produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Keadaan Responden Menurut Umur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kelompok Umur (Tahun)** | **Jumlah****(Orang)** | **Persentase****(%)** |
| 39 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 6465 ke atas | 4412075 | 12,5012,5037,50021,8815,62 |
| Jumlah | **32** | **100.00** |

Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat bahwa sebagian besar responden tergolong pada umur produktif yaitu sekitar 84,38 %. Sedangkan respoden yang tergolong pada umur non produktif adalah sekitar 15,62 %. Data mengenai keadaan umur responden tersebut dapat memberikan informasi terhadap hubungannya dengan kajian penelitian mengenai surplus padi serta ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.

 Menurut Soehardjodan Dahlan Patong (1973)bahwa keadaan umur akan mempengaruhi kemampuan fisik, produktivitas kerja dan berfikir dalam usahatani. Daya adopsi terhadap suatu inovasi baru pun cenderung lebih cepat mendapatkan respon dari petani berusia produktif dibandingkan dengan petani yang tergolong usia non produktif. Dengan demikian keadaan umur ini sedikit banyak mempengaruhi pada kegiatan usahatani yang dilakukan, apabila usahatani dikelola secara tepat dan cermat maka tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan produksinya. Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan akhir dari kegiatan usahataninya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap pola konsumsi keluarga petani. Selanjutnya pola konsumsi rumah tangga petani tersebut dapat mencerminkan tentang keadaan ketahanan pangannya.

* + 1. **Keadaan Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dibatasi hanya pada jalur pendidikan formal. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa secara umum responden pernah memperoleh pendidikan formal, tingkat pendidikan responden yang paling rendah adalah Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar (SD). Sedangkan tingkat pendidikan responden yang paling tinggi adalah sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tingkat pendidikan responden disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah Responden (Orang)** | **Persentase****(%)** |
| SDSLTPSLTA | 2732 | 84,3759,3756,250 |
| **Jumlah** | **32** | **100.00** |

Dari Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa persentase responden yang memperoleh pendidikan formal hingga SD memiliki angka yang paling tinggi yaitu sebesar 84,375 %. Sedangkan responden yang berpendidikan hingga SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 9,375 % dan 6,250 %. Hal tersebut menunjukkan informasi bahwa sebagian besar petani pada umumnya masih memperoleh tingkat pendidikan yang relatif rendah.

 Petani yang terbatas pengetahuannya serta kurang dinamis akan mengalami kesulitan dalam penguasaan dan penerapan teknologi pertanian (Soekartawi, 1986).Perilaku yang diusahakan pada diri petani dalam rangka pengelolaan usahatani pada umumnya berjalan lambat dikarenakan tingkat pengetahuan, kecakapan dan sikap mental petani yang relatif masih rendah. Lain halnya dengan petani yang sudah memperoleh pendidikan relatif tinggi maka cenderung lebih terbuka dalam menerima inovasi dan semakin luas wawasan yang dimilikinya.

 Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kematangan seorang petani dalam mengelola usahataninya. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi produktifitas usahataninya. Apabila terjadi peningkatan hasil produksi maka diharapkan dapat menciptakan surplus untuk pasar. Pada akhirnya petani memperoleh keuntungan dari meningkatnya pendapatan usahatani, selanjutnya rumah tangga petani memiliki kesempatan untuk meragamkan pola konsumsinya dalam rangka mewujudkan suatu kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani yang mantap.

* + 1. **Pengalaman Usahatani**

Pengalaman berusahatani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan seorang petani dalam mengelola usahataninya. Menurut Jalaludin Rahmat (2000) yang berpendapat bahwa tingkat pengetahuan manusia dapat diperoleh dari hasil belajar melalui pengalaman, banyak pengalaman maka semakin luas pula pengetahuannya. Petani yang telah memiliki pengalaman cukup lama akan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keuntungan usahataninya.

Lebih lanjut Soelistyo (1996)mengemukakan bahwa pengalaman petani dalam mengelola suatu usahatani akan mempengaruhi tingkat produktifitas usahatani itu sendiri. Semakin lama pengalaman seseorang dalam mengelola usahataninya, cenderung semakin tinggi pula tingkat produktifitas usahataninya. Pengalaman kerja yang baik akan selalu dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan yang kurang baik akan diusahakan menjadi lebih baik atau sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden, menunjukkan bahwa sesuai dengan sebaran umur petani maka lamanya pengalaman responden dalam berusahatani padi sawah menunjukkan variasi yaitu berkisar antara 17 - 46 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran pengalaman petani dalam berusahatani dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Tingkat Pengalaman Responden dalam Berusahatani Padi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tingkat Pengalaman (Tahun)** | **Jumlah Responden (Orang)** | **Persentase** **(%)** |
| 17 - 2728 - 3839 - 46 | 13109 | 40,625%31,250%28,125% |
| Jumlah | **32** | **100.00%** |

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa tingkat pengalaman responden dalam usahataninya secara umum relatif telah cukup lama. Pengalaman petani dengan kurun waktu antara 17 - 27 tahun mendominasi sekitar 40,625 %, sedangkan responden yang memiliki pengalaman paling lama yaitu dalam kurun waktu antara 39 - 46 tahun hanya sekitar 28,125 %. Rata-rata pengalaman berusahatani adalah 30 tahun. Untuk petani yang memiliki pengalaman usahatani belum terlalu lama kecenderungannya berkaitan dengan tingkat umur yang relatif lebih muda dan jenjang pendidikannya relatif lebih tinggi. Sedangkan untuk petani yang telah berpengalaman relatif sangat lama ada kecenderungan bahwa umurnya lebih tua dan jenjang pendidikannya relatif lebih rendah.

 Dengan demikian, petani yang memiliki pengalaman dalam pengetahuan melalui hasil belajar dari pengalamannya untuk meningkatkan hasil produksi yang lebih baik (apabila faktor pendukungnya tersedia). Diharapkan apabila terjadi peningkatan hasil produksi tentu akan mempengaruhi terhadap surplus produksinya sehingga petani memperoleh keuntungan.

* + 1. **Jumlah Tanggungan Keluarga Responden**

Tanggungan keluarga petani terdiri atas istri dan anak yang menjadi tanggung jawab keluarganya. Tanggungan keluarga pada sisi penyediaan tenaga kerja akan menguntungkan. Sedangkan pada sisi yang lain tanggungan keluarga merupakan beban secara ekonomis. Semakin banyak jumlah keluarga maka semakin besar kemungkinan responden untuk memperoleh tambahan pendapatan dari luar usahatani maupun di luar usahatani, sedangkan pada sisi yang lain beban ketergantungan yang cukup besar akan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden. Jumlah tanggungan keluarga responden menunjukkan angka yang bervariasi, yaitu berkisar antara 1 - 7 orang. Untuk lebih jelasnya data mengenai jumlah tanggungan responden disajikan pada Tabel 6.

## Tabel 6. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jumlah Tanggungan (Orang)** | **Jumlah Responden** **(Orang)** | **Persentase****(%)** |
| 1234567 | 4956611 | 12,50028,12515,62518,75018,7503,1253,125 |
| Jumlah | **32** | **100.00** |

 Dari Tabel 6 diatas terlihat bahwa persentase tertinggi ditunjukkan oleh responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2 orang yaitu sebesar 28,125 %, sedangkan persentase yang terendah ditunjukkan oleh responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga berkisar 6 - 7 orang yaitu sebesar 3,125 %. Sebaran jumlah tanggungan keluarga di lokasi penelitian pada umumnya lebih dari 2 orang. Sedangkan rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani adalah 4 orang. Apabila dikaitkan dengan besarnya beban ketergantungan (*Dependency ratio*), dimana setiap 1 orang penduduk usia kerja (produktif) harus menanggung beban sekitar 1 orang penduduk tidak produktif, maka tanggungan keluarga responden mayoritas berada di atasnya, hal tersebut memberikan indikasi bahwa jumlah tanggungan keluarga responden relatif tidak seimbang.

 Melihat besar beban ketergantungan yaitu 1 : 1 apabila dihubungkan dengan jumlah tanggungan keluarga responden yang mayoritas lebih dari 2 orang, maka hal tersebut merupakan suatu kendala dan sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktifitas usahataninya. Secara langsung jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh pada pola pengeluaran atau alokasi pendapatan terhadap input usahataninya.

Bagi petani padi jumlah anggota dari tanggungan keluarga akan mempengaruhi *marketable* *surplus* padi dikarenakan beras merupakan kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga petani yang memiliki peran sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Menurut Ujang Sumarwan (2003),rumah tangga dengan jumlah anggota yang lebih banyak akan mengkonsumsi beras lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki anggota lebih sedikit.

* + 1. **Luas Lahan Garapan Responden**

Dalam kegiatan usahatani padi sawah, luas lahan garapan merupakan faktor yang secara langsung akan berpengaruh pada tingkat produksi yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap pendapatan usahatani. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa responden memiliki luas lahan garapan yaitu berkisar antara 0,15 - 1 ha. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Luas Lahan Garapan Responden**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Luas Lahan Garapan (ha)** | **Jumlah Responden (Orang)** | **Persen (%)** |
| 0,15 - 0,330,34 - 0,570,58 - 1,00 | 5819 | 15,63%25,00%59,37% |
| **Jumlah**  | **32** | **100.00%** |

Dari Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa responden mayoritas memiliki luas lahan garapan antara 0,58 – 1,00 ha yaitu sebesar 59,375 % kemudian diikuti oleh responden yang memiliki luas lahan garapan kurang dari 0,34 - 0,57 ha yaitu sebesar 25,00 %, sedangkan persentase terendah ditunjukkan oleh responden yang memiliki luas lahan antara 0,15 - 0,33 ha yaitu sebesar 15,625 %. Secara keseluruhan rata-rata responden memiliki luas lahan garapan seluas 0,7 ha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa luas lahan garapan erat kaitannya dengan output yang dihasilkan.

* + 1. **Kegiatan Usaha Di Luar Usahatani**

Menurut Fadholi Hernanto (1995**)** pada umumnya rumah tangga petani tidak hanya mengandalkan satu jenis pekerjaan saja, biasanya rumah tangga petani tersebut bekerja pada sektor lain dikarenakan tidak cukupnya pendapatan dari usahatani untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari rumah tangganya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mata pencaharian pokok responden pada umumnya sebagai petani, namun disamping berusahatani padi terdapat beberapa responden yang mempunyai mata pencaharian di luar sektor pertanian, diantaranya adalah berdagang, jasa, berwiraswasta, pegawai maupun buruh tani. Atau menerapkan sedikit lebih maju seperti budidaya jamur merang, jamur kayu, atau mengolah sisa panen seperti pengolahan nada de coco, nata de soya. Pekerjaan petani ini melibatkan jamur dan bakteri yang masuk ke ranah microbiologi (Subandi, 2014). Untuk lebih jelasnya data mengenai kegiatan usaha di luar usahatani yang dimiliki oleh responden disajikan pada Tabel 8.

## Tabel 8. Kegiatan Usaha Responden di Luar Usahatani

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kegiatan Usaha** | **Jumlah Responden****(orang)** | **Persentase****(%)** |
| UsahataniUsahatani + Buruh taniUsahatani + JasaUsahatani + WiraswastaUsahatani + DagangUsahatani + PNS | 1035383 | 31,2509,37515,6259,37525,0009,375 |
| **Jumlah** | **32** |  **100,000**  |

Dari Tabel 8 di atas menunjukan bahwa mayoritas reponden menjadikan usahatani sebagai mata pencaharian utama, yaitu sebesar 31,25 % sedangkan persentase selanjutnya diikuti oleh responden yang memiliki mata pencaharian tambahan melalui berdagang yaitu sekitar 25,625 % sedangkan persentase responden yang memiliki tambahan penghasilan sebagai wiraswasta hanya sebesar 15,625 %, kemudian responden yang memiliki mata pencaharian tambahan sebagai buruh tani, jasa, atau pegawai persentasenya adalah sama yaitu masing- masing sebesar 9,375 %. Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden yang memiliki sumber mata pencaharian ganda akan memiliki tingkat pendapatan yang relatif berbeda dengan responden yang hanya memiliki sumber mata pencaharian dari usahatani saja. Selain itu, adanya tambahan pendapatan dari usaha lain diduga akan mempengaruhi sikap responden dalam menjual hasil produksinya.

* 1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
		1. **Analisa Surplus Padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.**
			1. ***Marketable Surplus* Padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang**

 Beras merupakan bahan pangan pokok yang memiliki porsi terbesar dalam menu makanan masyarakat pada umumnya, termasuk rumah tangga petani. Peran petani sebagai produsen padi tidak lantas mengabaikan kebutuhan bahan pangan pokok bagi keluarganya, terutama ketersediaan serta kecukupan konsumsinya. Hal tersebut berkaitan dengan peran petani yang salah satunya sebagai konsumen.

 Berdasarkan survey terhadap responden, rata-rata luas lahan garapan petani responden adalah 0,7 ha dengan rata-rata hasil produksi adalah 4.332,81 kg GKP per musim atau 8.665,62 kg GKP per tahun. Selama satu tahun petani responden mengalami intensitas masa panen sebanyak dua kali. Luas lahan garapan dan hasil produksi yang diperoleh petani dianggap tetap.

 Departemen Pertanian menyatakan tingkat konsumsi beras menurut standar kebutuhan konsumsi beras minimum yaitu sebanyak 109,5 kg/kapita/ tahun (LIPI,1998). Sedangkan di lokasi penelitian, rata-rata tingkat konsumsi beras rumah tangga petani responden adalah 650 kg per tahun atau setara dengan 1.473,92 kg GKP per tahun. Dengan demikian, apabila jumlah anggota rumah tangga petani di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang rata-rata dalam kisaran 3 - 5 orang maka tingkat konsumsi beras adalah 130 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi tersebut telah lebih dari cukup bahkan telah melebihi standar kebutuhan konsumsi beras minimum menurut Departemen Pertanian. Secara faktual, menurut data FAO bahwa rata-rata tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia yaitu sebesar 133 kg/kapita/tahun sudah dianggap relatif tinggi (LIPI,1998).

Dengan diketahuinya data rata-rata hasil produksi di tingkat rumah tangga petani, jumlah konsumsi beras serta jumlah rumah tangga petani dapat memberikan gambaran tentang *marketable surplus* padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil analisis (Lampiran 8), diketahui bahwa potensi kelebihan hasil produksi yang mampu ditujukan untuk dijual oleh rumah tangga petani yaitu sebesar 7.191,7 kg GKP. Dengan kata lain *marketable surplus* di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang adalah sebesar 8.932,09 ton GKP. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran *marketable surplus* di Desa Pamanukan Hilir dapat disajikan pada Tabel 9.

 **Tabel 9 Rata-rata potensi kelebihan padi di tingkat rumah tangga petani dan *marketable surplus* di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Rumah tangga petani****( kg GKP / tahun)** | **Desa Pamanukan Hilir** **(ton GKP/tahun )** | **Persentase ( % )** |
| * Hasil produksi padi.
* Kebutuhan Konsumsi
 | 8.665,621.473,92 | 10.762,70 1.830,61 | 100,00 17,01 |
| * **Potensi kelebihan / *marketable surplus***
 | **7.191,70** | **8932,09** | **82,99** |

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa pada tahun 2005 rumah tangga petani memiliki kelebihan hasil produksi yaitu 7.191,70 kg GKP atau sebesar 82,99 % dari produksi totalnya. Dengan demikian, *marketable surplus* padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang adalah 8.932,09 ton GKP.

* + - 1. ***Marketed Surplus* Padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang**

Tingkat *Marketed Surplus* padi akan ditentukan oleh tinggi rendahnya jumlah hasil produksi yang dikonsumsi dan yang dijual oleh petani serta jumlah seluruh petani yang ada di wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah hasil produksi yang dijual oleh rumah tangga petani dan tingkat *Marketed Surplus* di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dapat disajikan pada Tabel 10.

**Tabel 10. Rata-Rata Tingkat Penjualan Padi pada Rumah Tangga Petani dan *Marketed Surplus* Padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang pada Tahun 2005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Rumah tangga petani** **( kg GKP/tahun)** | **Desa Pamanukan Hilir** **( ton GKP/ tahun)** | **Persentase** **( % )** |
| Hasil produksi padi | 8.665,62 | 10.762,70 | 100,00 |
| **Penjualan padi/*****Marketed surplus*** | **6.562,50** | **8.150,62** | **75,73** |
| Padi yang tidak dijual | 2.103,12 | 2.612,08 | 24,27 |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata hasil produksi padi yang dijual oleh rumah tangga petani yaitu 6.562,50 kg GKP dari produksi totalnya atau sekitar 75,73 %. Dengan demikian jumlah hasil produksi yang benar-benar dijual atau *Marketed Surplus* padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang pada tahun 2005 yaitu sekitar 8.150,62 ton GKP.

 Jumlah padi yang tidak dijual oleh petani adalah 2.103.12 kg GKP sedangkan rata-rata tingkat kebutuhan konsumsi beras rumah tangga petani adalah 1.473,92 kg GKP, maka terdapat jumlah padi yang ditahan atau tidak dijual oleh petani sebesar 629,20 kg GKP.

Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa *marketed surplus* di di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang lebih rendah dari nilai *marketable surplus*nya. Dengan kata lain, potensi surplus padi yang dimiliki rumah tangga petani belum sepenuhnya terjual. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga petani cenderung menyimpan hasil produksinya melebihi tingkat kebutuhan konsumsinya.

Di Lokasi penelitian, harga gabah yang diterima petani berkisar dari Rp 1.500 per kg GKP – Rp 1.800 per kg GKP. Sedangkan sebaran rata-rata harga gabah yang diperoleh petani adalah Rp 1.600 per kg GKP. Pada umumnya petani di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang menjual dalam bentuk Gabah Kering Pungut (GKP) dan jarang yang menjual dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) dan praktis tidak pernah menjual dalam bentuk beras .

Alasan petani menyimpan padi melebihi kebutuhan konsumsinya dikarenakan selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarganya atau buruh pada musim tanam selanjutnya, juga ditujukan sebagai cadangan konsumsi pada saat harga beras mahal. Sedangkan jumlah padi yang dijual diorientasikan untuk memperoleh uang tunai guna memenuhi kebutuhan konsumsi pangan (non beras) maupun konsumsi non pangan dan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pada musim tanam berikutnya.

* + 1. **Gambaran Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani**

**9.2.2.1 Pengeluaran Konsumsi Pangan**

Adanya kelebihan ketersediaan pangan pokok (padi) di tingkat wilayah tidak menjamin adanya ketahanan pangan di rumah tangga petani. Faktor kunci ketahanan pangan adalah kemampuan anggota rumah tangga petani dalam mengakses kebutuhan pangan yang beragam dan di perlukan oleh tubuh. Salah satu indikator ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani diantaranya berkaitan dengan daya beli dan ketersediaan pangan yang beragam, untuk mengetahui tentang rata-rata pengeluaran konsumsi pangan ditingkat rumah tangga petani dapat disajikan pada tabel 11.

**Tabel 11. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Konsumsi Pangan** | **Pengeluaran Konsumsi (Rp/tahun)** | **Persentase****( % )** |
| 1 | Beras  | 2.990.000 | 25,54 |
| 2 | Umbi-umbian  | 14.625 | 0,12 |
| 3 | Ikan  | 901.224 | 7,70 |
| 4 | Daging  | 421.675 | 3,60 |
| 5 | Telur dan Susu  | 289.531 | 2,47 |
| 6 | Sayur-sayuran | 271.438 | 2,32 |
| 7 | Buah-buahan | 79.000 | 0,67 |
| 8 | Kacang – kacangan | 298.250 | 2,55 |
| 9 | Minyak goreng  | 187.000 | 1,60 |
| 10 | Bumbu – bumbuan  | 273.274 | 2,33 |
| 11 | Tembakau  | 694.875 |  5,90 |
| **Total** | **6.417.519** | **54,80** |

Dari tabel diatas menunjukan bahwa di tingkat rumah tangga petani padi pengeluaran konsumsi pangan untuk beras masih mendominasi. Hal ini di tunjukan dengan nilai persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 25,54 %. Berdasarkan hasil analisis *marketed surplus* padi diketahui bahwa jumlah padi yang disimpan atau dikonsumsi oleh rumah tangga petani melebihi tingkat kebutuhan konsumsi minimumnya, sehingga untuk pengeluaran konsumsi beras cenderung berasal dari hasil produksi sendiri. Apabila pada saat penelitian dilakukan rata-rata tingkat harga beras adalah Rp 4.600,- per kilogram, maka pada umumnya rata-rata tingkat konsumsi beras di rumah tangga petani yaitu sebesar 650 kg per tahun. Jumlah anggota rumah tangga petani di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang rata-rata berkisar 3-5 orang, dengan demikian rata-rata tingkat konsumsi beras perkapita per tahun adalah sebesar 130 kg. Angka konsumsi tersebut tergolong cukup tinggi bila di bandingkan dengan standar kebutuhan konsumsi beras menurut Pola Pangan Harapan Nasional yaitu sebesar 109,5 kg per kapita per tahun (LIPI,1998). Keadaan demikian sejalan dengan hasil penelitian Mewa Arifin dan Pantjar Simatupang (1998) yang mengemukakan bahwa proporsi konsumsi beras pada rumah tangga petani padi cenderung lebih besar apabila dibandingkan dengan rumah tangga petani sayuran maupun rumah tangga petani nelayan, hal tersebut dikarenakan rumah tangga petani padi tinggal di daerah penghasil.

Jenis konsumsi pangan yang termasuk umbi-umbian menunjukan angka persentase yang paling rendah di tingkat rumah tangga petani padi yaitu sebesar 0,12 %. Berdasarkan hasil analisis *marketed surplus* menunjukan bahwa jumlah padi yang dijual oleh rumah tangga petani relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi surplusnya. Hal tersebut menunjukan bahwa rumah tangga petani masih cenderung berperilaku subsisten terhadap hasil produksinya dan belum mampu melakukan diversifikasi atau penganekaragaman bahan pangan pokok, terutama umbi-umbian. Posisi umbi-umbian masih dijadikan sebagai bahan makanan jajanan atau sampingan. Petani dan keluarganya masih beranggapan belum makan apabila belum makan nasi, sehingga upaya menuju diversifikasi bahan pangan pokok masih dianggap relatif sulit dilakukan di tingkat rumah tangga petani padi.

 Bahan pangan sumber protein hewani diperoleh oleh rumah tangga petani dari mengkonsumsi ikan, daging, telur dan susu. Persentase masing-masing bahan pangan tersebut yaitu sebesar 7,70 %, 3,60 % dan 2,47 %. Ikan, daging,dan telur merupakan barang komplementer bagi bahan pangan pokok, dan bagi rumah tangga petani kedudukan ketiga bahan pangan sumber protein hewani tersebut merupakan barang subtitusi antar lainnya. Angka persentase untuk pengeluaran konsumsi ikan relatif lebih tinggi bila di bandingkan daging dan telur. Hal tersebut diduga karena harga ikan relatif lebih murah sedangkan harga daging, terutama daging sapi masih dianggap sebagai barang superior sehingga menjadikan konsumsi ikan lebih sering daripada daging. Saat survey penelitian dilakukan, konsumsi daging ayam dan telur di rumah tangga petani cenderung mengalami penurunan hal tersebut diduga terdapat keterkaitan antara issue kesehatan dengan respon pasar, untuk konsumsi susu di tingkat rumah tangga petani masih tergolong relatif rendah dikarenakan faktor daya beli, selera dan pola hidup.

Bahan pangan sumber protein nabati diperoleh rumah tangga petani dari mengkonsumsi kacang-kacangan (tempe,tahu,dan olahan lainnya). Persentase untuk pengeluaran konsumsi kelompok pangan ini tergolong relatif rendah yaitu sebesar 2,55 %. Hal tersebut diduga adanya pergeseran konsumsi bahan pangan disebabkan adanya faktor perubahan tingkat pendapatan. Kelompok pangan kacang-kacangan semula memiliki posisi sebagai barang normal pada tingkat pendapatan tertentu. Ketika tingkat pendapatan rumah tangga petani berubah lebih tinggi maka cenderung bergeser menjadi barang inferior dan beralih ke bahan pangan sumber protein hewani.

Bahan pangan lain sebagai sumber vitamin dan mineral diperoleh rumah tangga petani dari konsumsi sayur-sayuran dan buah–buahan. Persentase masing-masing bahan pangan tersebut yaitu sebesar 2,32 % dan 0,67 %. Persentase sayuran lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan dikarenakan harga sayuran relatif cukup murah walaupun harus dibeli dan bisa mengkonsumsinya setiap hari. Sedangkan tingkat konsumsi buah – buahan di rumah tangga petani menunjukan angka persentase yang relatif kecil dikarenakan harga buah–buahan masih dianggap relatif mahal sehingga mengakibatkan pembelian pada rumah tangga petani relatif jarang.

Pengeluaran konsumsi bumbu dapur dan minyak goreng masing-masing menunjukan persentase sebesar 2,64 % dan 1,81%. Bumbu dapur dan minyak goreng merupakan barang komplementer dari bahan pangan (lauk pauk dan sayuran) yang dikonsumsinya. Pengeluaran bumbu dapur lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk konsumsi minyak goreng, hal ini dikarenakan penggunaan bumbu dapur lebih sering daripada minyak goreng yang pemakaiannya dapat berulang–ulang sehingga mengakibatkan pembelian minyak goreng ditingkat rumah tangga petani relatif jarang.

Pengeluaran konsumsi tembakau atau rokok menunjukan persentase yang cukup besar dikarenakan sebagian besar responden merokok sedangkan kebutuhan konsumsi ini tidak dapat digantikan oleh konsumsi lainnya. Bagi sebagian besar petani responden yang perokok berat tenbakau (rokok) merupakan barang normal yang memiliki elastisitas = 0, artinya tingkat pendapatan relatif tidak mempengaruhi terhadap tingkat konsumsi tembakau (rokok).

* + - 1. **Pengeluaran Konsumsi Non Pangan**

Kebutuhan yang harus terpenuhi bagi kehidupan manusia disamping kebutuhan pangan adalah kebutuhan non pangan, antara lain adalah kebutuhan akan perumahan, barang dan jasa, pendidikan, sandang, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya pengeluaran non pangan rumah tangga petani dapat dilihat pada tabel 12.

**Tabel 12. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Petani**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pengeluaran Non Pangan** | **Pengeluaran Konsumsi****( Rp/Tahun )** | **Persentase** **( % )** |
| 1 | Perbaikan rumah, bahan bakar, penerangan dan air | 1.408.000 | 12,03 |
| 2 | Aneka barang dan jasa | 465.625 | 3,98 |
| 3 | Biaya pendidikan | 1.599.200 | 13,66 |
| 4 | Biaya kesehatan |  18.187,5 | 0,16 |
| 5 | Pakaian, alas kaki, tutup kepala | 1.201.600 | 10,26 |
| 6 | Barang-barang tahan lama |  318.281,25 | 2,72 |
| 7 | Pajak  | 113.250 | 0,97 |
| 8 | Pengeluaran lain-lain ( sumbangan, undangan, pesta ) |  180.937,5 | 1,55 |
| **Total** | **5.290.062,5** | **45,20** |

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pengeluaran untuk biaya pendidikan memiliki persentase yang sangat tinggi yaitu sebesar 13,66 %. Tingginya angka persentase tersebut dikarenakan sebagian besar responden masih memiliki tanggungan keluarga (anak) yang masih sekolah. Selain itu, petani secara umum telah menyadari arti penting pendidikan bagi anak-anaknya dengan harapan masa depan anak-anak mereka harus lebih baik dari keadaan orang tuanya sekarang. Biaya pendidikan yang dimaksud meliputi pengeluaran untuk pembayaran SPP, alat tulis dan transportasi.

Pengeluaran non pangan lainnya yang menunjukan persentase cukup tinggi yaitu pengeluaran untuk bahan bakar dan penerangan yaitu sebesar 12,03%. Kebutuhan akan minyak tanah sangat penting dalam proses memenuhi kebutuhan konsumsi pangan, walaupun peningakatan biaya untuk bahan bakar dirasakan cukup memberatkan petani dan keluarganya dikarenakan harga bahan bakar beberapa kali mengalami peningkatan tetap saja petani membelinya. Terkadang petani mengatasinya dengan cara menggunakan kayu bakar untuk memasak tetap saja kebutuhan minyak tanah selalu diperlukan. Di tingkat rumah tangga petani penggunaan minyak tanah beragam antara 120-300 liter/tahun. Demikian halnya untuk pengeluaran tarif listrik pun cukup besar bagi rumah tangga petani di karenakan dalam kehidupan sehari–hari tidak terlepas dari partisipasi menggunakan energi listrik, sedangkan pengeluaran rumah tangga petani untuk perbaikan rumah relatif jarang dikarenakan sifat dari pengeluaran tersebut adalah insidentil.

Pengeluaran untuk konsumsi pakaian dan alas kaki menunjukan persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,26 %. Pengeluaran untuk pakaian ini biasanya dilakukan hanya satu kali sampai dua kali dalam setahun, terutama pada saat lebaran.

Pengeluaran konsumsi untuk barang-barang tahan lama dan aneka barang serta jasa masing-masing memiliki persentase sebesar 2,72 % dan 3,98 %. Barang –barang tahan lama relatif jarang dibeli oleh rumah tangga petani sehingga persentasenya lebih rendah bila dibandingkan dengan aneka barng dan jasa. Barang tahan lama yang dimaksud adalah perabotan rumah tamgga ,barang-barang elektronik, dan lain-lain. Sedangkan aneka barang dan jasa yang dimaksud adalah sabun,pasta gigi, detergen, kosmetik dan lain-lain.

Pengeluaran rumah tangga petani untuk pajak dan sumbangan (undangan) masing-masing memiliki persentase sebesar 0,97 % dan 1,55%. Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan, adanya perbedaan besarnya pajak yang dibayar oleh rumah tangga petani dikarenakan tergantung pada luas lahan atau NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Pengeluaran sumbangan atau undangan memiliki persentase yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk pajak dikarenakan hal ini tergantung pada jumlah orang yang mempunyai hajat dan banyaknya undangan yang didapat.

Alokasi pengeluaran untuk biaya kesehatan relatif kecil yaitu sebesar 0,17% Rendahnya persentase untuk biaya kesehatan diduga karena rumah tangga petani jarang mengalami sakit dan bilamana mengalami sakit ringan biasanya memperoleh obat ringan yang dijual bebas di warung.

**9.2.2.3 Pangsa Pengeluaran Pangan**

 Pangsa pengeluaran pangan merupakan ratio antara besarnya pengeluaran konsumsi pangan terhadap pengeluaran total konsumsi rumah tangga petani. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga petani dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan kepala keluarga, lingkungan, pola hidup, dan lain-lain. sehingga besarnya pengeluaran total rumah tangga sangat beragam antara satu rumah tangga petani dengan rumah tangga lainnya.

 Untuk mengetahui tingkat pendapatan rumah tangga dapat dilakukan melalui pendekatan pengeluaran konsumsi baik pangan maupun non pangan. Apabila dikaitkan dengan tingkat surplus yang dimiliki petani, maka semakin besar potensi surplus yang dijualnya cenderung semakin besar tingkat penerimaanya selanjutnya akan berdampak positif pada tingkat pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan petani maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pangan ke non pangan, proporsi pengeluaran rumah tangga petani tersebut dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Berdasarkan hasil survey, rata-rata pengeluaran total rumah tangga petani yaitu sebesar Rp 11.707.582 per tahun. Lebih rinci lagi, pengeluaran konsumsi untuk pangan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi untuk non pangan, yaitu masing–masing sebesar Rp 6.417.519 per tahun dan Rp 5.290.063 per tahun. Dengan demikian rata-rata pangsa pengeluaran pangan di tingkat rumah tangga petani yaitu sebesar 54,82 %. Menurut indikator dari pangsa pengeluaran pangan yang menyatakan bilamana pangsa pengeluaran pangan tergolong kurang dari 60 % maka rumah tangga tersebut tahan pangan. Dengan kata lain, kondisi rumah tangga petani di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tergolong tahan pangan. Namun apabila melihat rata-rata proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga petani di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang ternyata belum mengalami peningkatan kesejahteraan dimana proporsi pengeluaran konsumsi untuk non pangan masih relatif kecil dibanding dengan peningkatan proporsi pengeluaran konsumsi untuk pangan. Badan Pusat Statistika menyatakan bahwa tingkat kejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga bersangkutan. Peningkatan pengeluaran konsumsi untuk non pangan pada tingkat rumah tangga petani menunjukan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan.

**10. Kesimpulan dan Saran**

**10.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penerapan teknologi usaha tani padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang pada umumnya sudah relatif sesuai dengan kisaran takaran pemupukan yang dianjurkan untuk wilayah Jawa Barat, namun penggunaan benih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah alokasi penggunaan yang dianjurkan. Apabila mengacu pada rekomendasi penggunaan pupuk menurut teknologi Paket D relatif masih rendah dalam penggunaannya. Tingkat produktivitas usaha tani padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang adalah 6,2 ton GKP per Ha sedangkan target produktivitas menurut penerapan teknologi Paket D adalah 9 Ton GKP per Ha.
2. Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang memiliki *Marketable Surplus* padi sebesar 9220,76 ton GKP atau setara dengan 4.066,35 ton beras menunjukan lebih tinggi daripada *Marketed Surplus* padi di daerah tersebut yaitu sebesar 8.150,62 ton GKP atau setara dengan 3.594,42 ton beras. Ditingkat Rumah Tangga petani di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang terdapat kecenderungan potensi surplus yang dimilikinya belum sepenuhnya terjual, bahwa persediaan pangan pokok (padi yang tidak dijual) melebihi tingkat kebutuhan konsumsi minimum rumah tangga petani adalah sebesar 75,73 % lebih rendah Surplus padi yang berpotensi untuk dijual adalah sebessar 85,67 %. Jumlah padi yang disimpan atau dikonsumsi oleh petani 24,27 % lebih tinggi daripada tingkat kebutuhhan konsumsi minimum yang layak dikonsumsi sebesar 14,33%.
3. Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga petani padi untuk pangan yaitu sebesar Rp. 6.417.519 menunjukkan lebih besar daripada pengeluaran konsumsi untuk non pangan yaitu sebesar Rp. 5.290.062,5. Dalam alokasi pengeluaran konsumsi untuk pangan, proporsi konsumsi beras lebih besar dibandingkan jenis pangan lainnya. Tingkat konsumsi beras per kapita pertahun di rumah tangga petani padi rata-arata sebesar 130 kg melebihi standar kebutuhhan konsumsi beras menurut Departemen Pertanian yaitu sebesar 109,5 kg perkapita per tahun namun cenderung lebih rendah bila dibandingkan tingkat konsumsi rata-rata penduduk Indonesia menurut data FAO yaitu sebesar 133 Kg per kapita pertahun. Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani padi di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yaitu sebesar 54,82 % menunjukkan kondisi tahan pangan namun secara relatif belum mengalami peningkatan kesejahteraan.

**10.2 Saran**

1. Agar mencapai tingkat produktifitas padi yang diharapkan menurut penerapan teknologi paket D, maka alokasi penggunaan sarana produksi untuk pupuk dan benih relatif perlu disesuaikan dengan anjuran. Dalam hal ini kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan dapat meningkatkan perannya dalam mensosialisasikan penerapan teknologi yang dimaksud, sehingga petani dapat mengetahui, memahami, dan selanjutnya mampu menerapkan teknologi tersebut.
2. Petani diharapkan dapat merubah orientasi usahataninya yang semula bersikap subsisten menjadi komersil, sehingga besarnya *marketed surplus* padi di tingkat petani benar-benar sama dengan *marketable surplus*nya, maka dari hasil penjualan padi tersebut diharapkan penerimaan petani akan meningkat. Selanjutnya peningkatan penerimaan petani diharapkan memberikan surplus pendapatan bagi petani.
3. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan rumah tangga petani di pandang dari sisi kecukupan pangan dan gizinya diperlukan penelitian lebih lanjut.

## Daftar Pustaka

Adiratma. 1962. *Masalah Iron Stock Beras*. FP UI, Jakarta

Baliwati Y.F. 2004. *Pengantar pangan dan Gizi.* Penebar Swadaya, Jakarta.

Biro Pusat Statistik. 2004. *Survei Sosial Ekonomi Pertanian 1999, 2004*

Biro Pusat Statistik. 2005. Indikator Kesejahteraan Rakyat, Subang.

Chaerul Saleh, 1983. *Pola Pengeluaran Rumah Tangga dan Penguasaan Modal Bukan Tanah.* Studi Dinamika Pedesaan-Survey Agro Ekonomi, Bogor.

Dinas Pertanian. 2004. *Laporan Tahunan Tanaman Pangan Tahun 2004 Kabupaten Subang*. Kantor Dinas Pertanian, Subang

Direktorat Bina Sarana Usaha Tanaman Pangan. 1978. *Pedoman Perhitunan Marketable Surplus Hasil Tanaman Pangan*, Jakarta.

Edi Kusniadi dan S. Ratnaningtyas. 2000. *Surplus Produksi Padi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.* Faperta UNWIM, Tanjungsari (tidak dipublikasikan)

Handewi dan Mewa Ariani. 2002. *Ketahanan pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi*. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sosial ekonomi Pertanian, Bogor.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1998. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. Tema “ Pangan dan Gizi Masa Depan Meningkatkan Produktivitas dan Dya Saing Bangsa, Serpong 17 – 20 Februari 1998.

Mubyarto. 1967. *Faktor Perangsang Dalam Pembangunan Pertanian*. Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_ 1987. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pertanian.* Sinar Harapan, Jakarta.

Pakpahan dan Sri Hastuti. 1992. *Ketahanan Pangan Masyarakat Berpendapatan Rendah.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

Penny D.H. 1990. *Kemiskinan : Peran Sistem Pasar*. UI Press, Jakarta

Ratnaningtyas. 2004. *Pengukuran Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga.* Majalah Ilmiah UNWIM Lembaga Penelitian UNWIM, Jatinangor.56-58.

56

Saragih, Bungaran. 2001. *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. PT Loji Grafika Griya Sarana, Bogor

Singarimbun Masri dan Penny.1976. *Penduduk dan Kemiskinan*. Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Soekartawi, 2002. *Prinsip dasar Ekonomi Pertanian : Teori dan Aplikasi.* Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyarto. 1994. pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Seri 3, Jakarta.

Soelistyo. 1996. Pengantar Ilmu Ekonomi Pertanian. Karunika, Jakarta.

Tampubolon SMH, 2002. *Suara dari Bogor: Sistem dan Usaha Agribisnis* *Kacamata Sang Pemikir.* Pusat Studi Pembangunan IPB, Bogor.

Toto Warsa dan Cucu S.A. 1979. *Metode dan Rancangan Penarikan Contoh.* Bagian Statistika Faperta UNPAD, Bandung.

Subandi, M., (2011). Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy. Jurnal Istek. V(1-2): 1-18.

Subandi, M. (2012). Several Scientific Facts as Stated in Verses of the Qur’an. International Journal of Basic and Applied Science. Vol. 01 (01): 60-65.

Subandi, M .and Abdelwahab M. Mahmoud. 2014. Science As A Subject of Learning in Islamic University. Jurnal Pendidikan Islam.  **.** Vol. 1, No. 2, December 2014 M/1436 H.

[Subandi, M (2011a) .BudidayaTanaman Perkebunan](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ePjiv6kAAAAJ&citation_for_view=ePjiv6kAAAAJ:TQgYirikUcIC). Buku Daras. Gunung Djati Press.

Subandi, M (2014). Mikrobiologi, Kajian dalam Perspektif Islam. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Pp.234+xxvi